



**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) *ILEGAL*
SEBAGAI KORBAN *TRAFFICKING* DI KENDAL**

Penulisan Hukum

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Oleh:

GINDARA GINTING

11010113130517

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) *ILEGAL* SEBAGAI KORBAN *TRAFFICKING* DI KENDAL

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang.

Disusun Oleh

Nama : Gindara Ginting

NIM : 11010113130517

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

BUDHI WISAKSONO, S.H., M.HA.M. Endah Sri A., S.H. MHum.

NIP. 195106291982031001

NIP. 196508251992032001

HALAMAN PENGUJIAN

**“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) *ILEGAL*
SEBAGAI KORBAN *TRAFFICKING* DI KENDAL”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

Gindara Ginting
NIM. 11010113130517

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 28 November 2017

DEWAN PENGUJI

Ketua

BUDHI WISAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 195106291982031001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

A.M. Endah Sri A., S.H. MHum. **Dr. Pujivono, S.H., M.Hum.**
NIP.196508251992032001 NIP.196308221990011001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui :
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.Marjo, S.H., M.Hum.

NIP.196204101987031003

NIP.196503181990031001

MOTTO

“HIDUP ADALAH SEBUAH PROSES, SEMAKIN KAMU
BERPROSES MAKA KAMU SEMAKIN HIDUP”

KUPERSEMBAHKAN

Kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih

Puji Syukur dan terima kasihku

Atas limpahan berkat dan sukacita

Dan Segala-galanya

Kepada Kedua Orang Tuaku,

Kakakku, keluarga serta teman-teman terkasih

Terima kasih atas bantuan, dukungan, perhatian,

Doa dan kasih sayang

Juga cinta setia

Hingga tulisan ini terwujud.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan terhadap Korban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) *Ilegal* sebagai Korban *Trafficiking* di Kendal”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapakbudhi Wisaksono S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.

6. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta nasehat dalam ujian skripsi ini.
8. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan masukan selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
11. Papa Dan Mama saya Patriot Ginting dan Merry Sembiring, serta kakak saya Venny Ginting yang telah memberikan semangat dan memberikan perhatian serta doanya.
12. Bintang Sitorus, Aida suri dan Diah Ayu Kholiviayang juga sebagai penyemangat dalam pembuatan Skripsi ini, memberikan perhatian dan doanya.
13. Sahabat dekat saya selama di Semarang Samuel Siregar, Eko pakpahan, Jeremia Ganes, Pintar Siregar, Yudha Immanuel, Cerroy saragi, Samesnego barus, erik Extrada, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

14. Sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Kelvin Junisandrio dan Alma Angelo, yang juga memberikan perhatian dan dorongan serta doanya.
15. Alumni SMA Santo Thomas 1 medandi Semarang yang selalu memberikan semangat serta doa.
16. Teman-teman PRMK Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
17. Teman-teman Pengembangan Karir Mahasiswa BEM FH Universitas Diponegoro 2015 & 2016.
18. Teman-teman Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan, dan spiritnya kepada penulis.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, 28 November 2017

Penulis

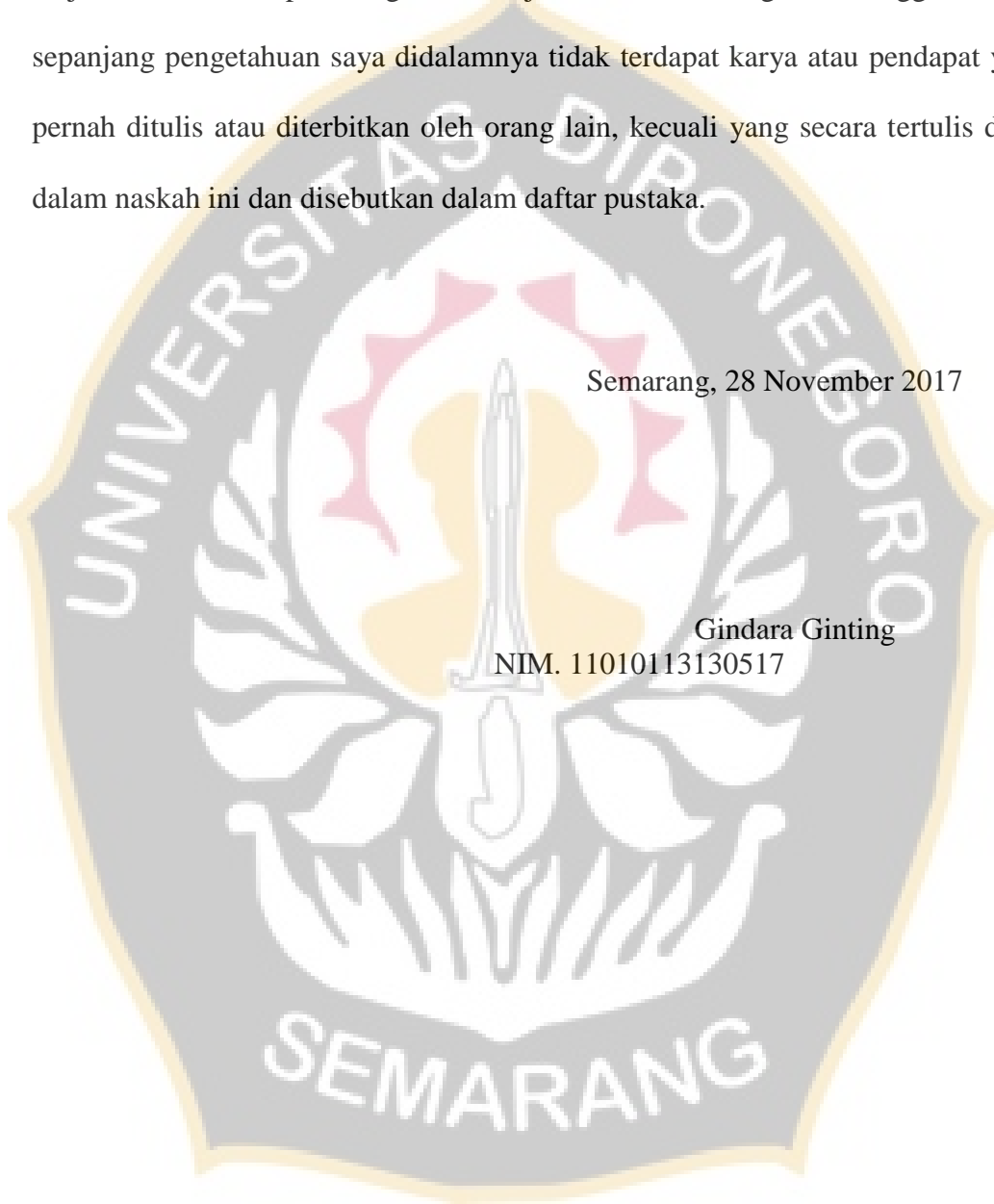
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 November 2017

Gindara Ginting

NIM. 11010113130517



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan orang dan Pengaturannya	13
A. 1. Pengertian Perdagangan Manusia	13
A. 2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
B. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hak dan kewajiban, persyaratan dan Mekanisme untuk bekerja di Luar Negeri.....	20

B.1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	20
B.2. Hak dan Kewajiban calon TKI/TKI	22
B.3. Persyaratan Tenaga Kerja Indonesia	41
B.4. Mekanisme Calon TKI/TKI untuk bekerja Di Luar Negeri.....	29
C. Tinjauan umum tentang korban kejahatan dan Perlindungan.	39
C.1. Pengertian Korban Kejahatan.....	39
C.2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	42
C.3. Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
BAB III. METODE PENELITIAN	48
A. Metode Pendekatan	48
B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Metode Penentuan Sampel	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <i>illegal</i> Sebagai Korban <i>Trafficking</i> Oleh Pemerintah Daerah Kendal.....	53
B. Kendala Dan Upaya Apa Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tenaga Kerja Indonesia (TKI) <i>Illegal</i> Sebagai Korban <i>Trafficking</i> Oleh	

Pemerintah Daerah Kendal.....	83
B. 1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian	
Perlindungan Hukum TKI <i>illegal</i> Sebagai Korban	
<i>Trafficking</i> Oleh Pemerintah Daerah Kendal.....	83
B. 2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah	
Kendal Untuk Mengatasi Kendala-Kendala	
Yang Ada	85
BAB V. PENUTUP	87
A. simpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi yaitu urutan ke empat di dunia. Jumlah penduduk yang besar tersebut juga menjadi masalah besar bagi upaya pemerintah Indonesia untuk menyejahterakan kehidupan bangsanya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu langkah pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran adalah melakukan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri. Tingkat pendidikan yang cukup rendah dan tidak merata serta hal lainnya seperti pola pikir lingkungan tempat tinggal ditambah maraknya percaloan TKI merupakan beberapa penyebab banyak diantara para calon TKI dari daerah ini tidak hanya kemudian menjadi TKI ilegal dengan banyak risiko yang harus dihadapi tetapi juga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)/trafficking.

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah kendal terhadap TKI ilegal korban trafficking serta upaya dan kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan terhadap TKI Ilegal. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kendal, Polisi daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG), dan Kepolisian Resor (polres) Kendal dan Korban TKI ilegal.

Kata kunci : Peran Pemerintah Daerah, TKI Ilegal, Trafficking

Abstract

Indonesia has high population of citizen which is number four in the world. The high population of citizen is a big problem for Indonesia's government efforts to prospere its people's life. This can be seen in the number of workers development that is not balance with labor ability which involve the number of unemployment increse in Indonesia. One of government actions to reduce unemployment population is to send Indonesian labors to overseas. The low level of unequal education such as the mindset of habitation and the amount of Indonesian labors' pimp is several causes that makes Illegal Labors should face many risks therefore make them become victims of Human Trafficking.

The problem in this case is what kind of protection that can be given from the Kendal government to the ilegal Indonesian labors trafficking, effort, and obstacles which should be face in giving protection for the illegal indonesian labors. Thus, the approachment used in this research is juridical empiric. This juridical empiric approach is a procedure that use to solve this research problem and use secondary data previously and then proceed with primery data in social life. The utility of this empirical research is to discover the result and information through the real object in Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kendal, Polisi Daerah Jawa Tengah (POLDA JATENG), and Kepolisian Resor (Polres), and victim of Ilegal Indonesian Labors.

Keywords: Role of Local Government, Ilegal Labors, Trafficking